



DIBONGKAR!

RP233 T ANGGARAN PENDIDIKAN TERSEDOT MBG

PDIP: Alokasi Diatur di UU APBN dan Perpres

Total Anggaran Pendidikan 2026

SEKITAR RP757,8-RP769,1 TRILIUN

Tetap 20% dari belanja negara

A. Belanja Pemerintah Pusat

RP 470,4 TRILIUN

Naik karena pembiayaan program strategis nasional

○ Badan Gizi Nasional (BGN):
± RP223,5 TRILIUN
Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)

○ Kemendikdasmen:
± RP55,4 TRILIUN

○ Sisanya tersebar di 22 K/L lain yang punya fungsi pendidikan

B. Transfer ke Daerah Pendidikan

RP 264,7 TRILIUN

Turun sekitar 23,7% (minus Rp82,4 triliun)

Penurunan terbesar:
○ DAU & DBH pendidikan
RP18,1 TRILIUN

**PERBANDINGAN RINGKASAN
ANGGARAN (TRILIUN RUPIAH)**

2026
● Rp 757,8 (rencana)
● Rp 335 (Pagu)

2024
● Rp 624,3
● -

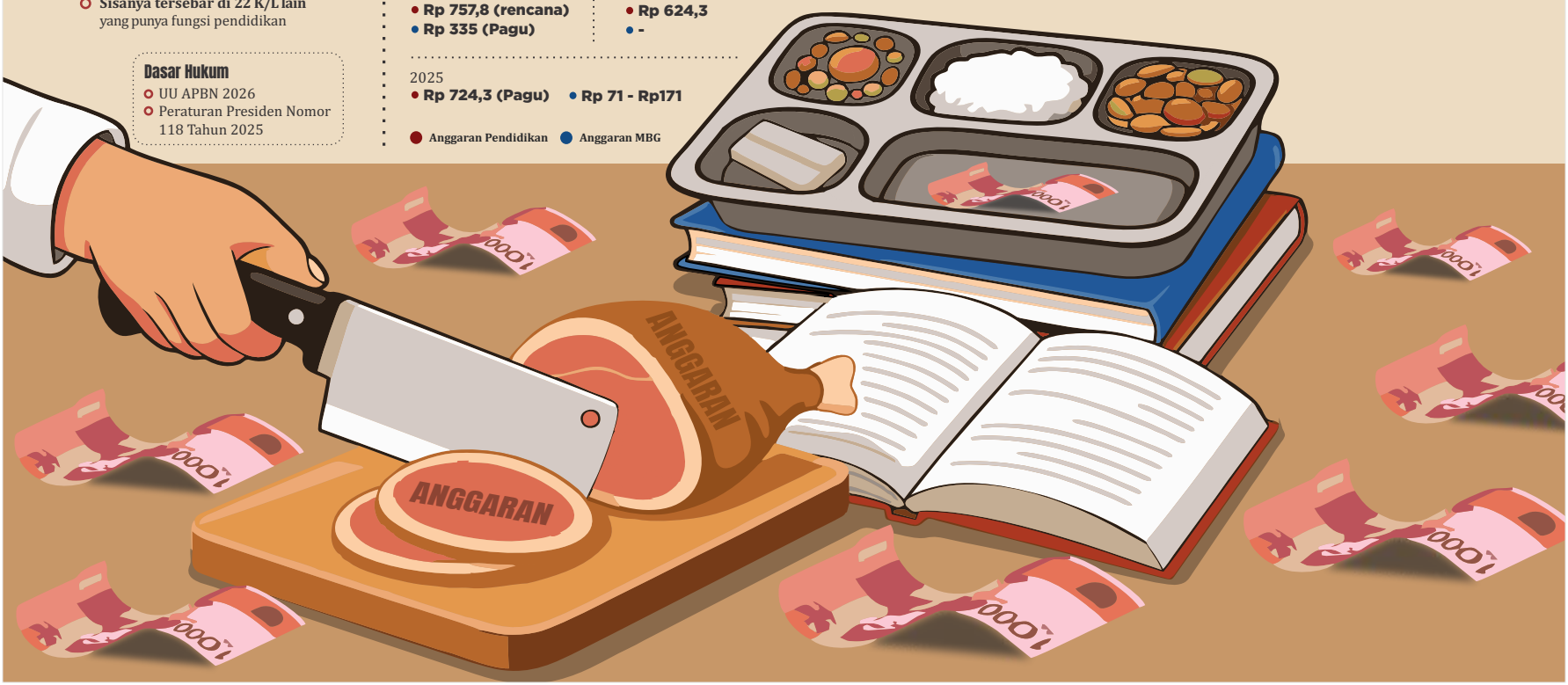
2025
● Rp 724,3 (Pagu) ● Rp 71 - Rp171

● Anggaran Pendidikan ● Anggaran MBG

Dasar Hukum

- UU APBN 2026
- Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025

Di tengah polemik gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal porsi anggaran pendidikan, PDI-P membongkar jika Rp 223,5 triliun dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang tercantum dalam pos pendidikan pada APBN 2026. Ini mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan Presiden. Pernyataan ini sekaligus membantah narasi bahwa MBG tidak menyentuh anggaran pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah lebih dulu membantah adanya pemangkasan anggaran pendidikan untuk program tersebut. Mendikdasmen, Prof. Dr. Abdul Mu'ti bersikukuh anggaran pendidikan pada 2026 mengalami bersikuk. Saling silang pernyataan para petinggi negeri ini membuka kembali perdebatan krusial, apakah pencantuman tersebut sah secara konstitusional dan tidak menggerus mandat alokasi minimal 20 persen untuk pendidikan murni? Sorotan tak berhenti di situ, muncul pula dugaan mark-up di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga keluhan menu yang dinilai jauh dari standar bergizi. BACA HAL 11...



DI HADAPAN RAJA ABDULLAH II, PRABOWO BICARA BoP DAN PALESTINA

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali garis diplomasi Indonesia atas konflik Palestina-Israel. Di hadapan Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Raja Abdullah II ibn Al Hussein, ia menyebut solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan keluar yang langgeng bagi perdamaian Gaza.

Pertemuan bilateral berlangsung di Istana Basman, Amman, Rabu (25/2/2026). Dalam pengantar pertemuan itu, Prabowo menekankan komitmen Indonesia untuk berkontribusi aktif mendorong perdamaian jangka panjang.

"Ya, Indonesia berkomitmen untuk melakukan apa pun yang kami bisa demi solusi yang langgeng. Dan menurut pendapat kami, satu-satunya solusi (damai) yang langgeng adalah solusi dua negara dengan Palestina yang merdeka," kata Prabowo Subianto.

Ia menjelaskan, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) serta dukungan terhadap rencana 20 poin yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, merupakan bagian dari upaya tersebut.

"Dan itulah sebabnya ketika kami diundang untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace), dan kami mendukung rencana 20 poin dari Presiden Trump, itu semua dilakukan dengan pandangan dan upaya untuk melakukan apa pun yang kami bisa guna mencapai solusi



langgeng tersebut," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, ia kembali menegaskan alasan dukungan itu. "Itulah sebabnya ketika kami diundang untuk bergabung dalam Board of Peace dan kami mendukung rencana 20 poin dari Presiden Donald Trump, semuanya dilakukan dengan tujuan dan upaya untuk melakukan apa pun yang kami bisa, guna mencapai solusi yang langgeng tersebut," kata Prabowo.

Menurut dia, Indonesia siap

melakukan berbagai langkah konkret untuk mendorong penyelesaian damai yang berkelanjutan. Solusi dua negara dengan berdirinya negara Palestina merdeka, ujar dia, merupakan satu-satunya opsi realistis untuk mengakhiri siklus konflik.

Pertemuan tersebut juga membahas tindak lanjut rapat pertama BoP bersama Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, serta sejumlah negara tepi barat lain sesama anggota. Sekretaris Kabinet Teddy

Indra Wijaya menyebut pembahasan menitikberatkan pada penguatan koordinasi negara-negara kawasan.

"Menindaklanjuti rapat pertama BoP (Board of Peace) dengan Arab Saudi, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain, dan negara tepi barat lain sesama anggota BoP," ujar Teddy di Amman.

Ia menambahkan, kedua pemimpin negara membicarakan penguatan peran Indonesia dan Yordania dalam menangani situasi di Gaza. Menurut dia, Yordania memiliki posisi strategis dalam mendukung akses kemanusiaan maupun diplomasi kawasan.

"Perkuat kerja sama RI-Yordania tangani perdamaian di Gaza. Yordania adalah salah satu pintu masuk melalui darat, laut dan udara," kata Teddy.

Selain Gaza, Prabowo juga menyinggung situasi di Tepi Barat yang dinilai berpotensi memengaruhi berbagai upaya yang sedang dijalankan di Gaza. Ia menekankan pentingnya koordinasi erat agar kedua negara dapat terus memantau perkembangan lapangan.

"Jadi kami ingin memperkuat dan meningkatkan kerja sama ini, dan saya rasa tim saya akan bekerja sama secara erat dengan tim Anda, sehingga kita selalu memantau situasi, kita tahu persis apa yang akan terjadi. Namun terima kasih banyak, kami juga ingin mendukung Yordania dalam upaya-upaya Anda," ujar Prabowo.

Dalam suasana yang disebut hangat dan akrab, Presiden menyampaikan apresiasi atas sambutan pemerintah Yordania. Ia menyebut hubungan personalnya dengan Raja Abdullah II telah terjalin selama puluhan tahun dan bahkan menyebut Yordania sebagai rumah keduanya.

"Atas nama Indonesia dan secara pribadi, saya juga ingin menyampaikan Ramadan Mubarak kepada rakyat Yordania," ucapnya.

Sebagai penutup rangkaian kunjungan, Raja Abdullah II mengantar langsung Prabowo menuju bandara dan menyopiri sendiri kendaraan yang membawa keduanya. Momen itu dipandang sebagai simbol kedekatan personal dan diplomatik di tengah komitmen bersama mendorong perdamaian kawasan.

Dalam sambutannya, Raja Abdullah II mengapresiasi konsistensi Indonesia memperjuangkan solusi dua negara sebagai jalan penyelesaian konflik Palestina-Israel. Ia menyebut sikap tersebut berarti bagi upaya meredakan ketegangan di kawasan.

"Ini adalah sesuatu yang jelas menghangatkan hati kami semua. Saya tahu bahwa Anda berkomitmen untuk membawa perdamaian dan ketenangan, dan sekali lagi komitmen Anda yang sangat berani untuk melindungi rakyat Gaza, menurut saya sangatlah penting. Dan saya menantikan diskusi ini mengenai bagaimana kita dapat membantu saudara-saudara kita dalam hal tersebut," kata Raja Abdullah. (wid,ist,kum/dya)

Survei: 50,4% Tolak Indonesia Gabung BoP

SEBANYAK 50,4 persen pengguna media sosial menyatakan tidak sepakat dengan langkah Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Temuan itu dirilis lembaga Media Survei Nasional (Median). Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, menyampaikan bahwa angka penolakan tersebut berkaitan dengan cara publik memandang keberpihakan forum internasional tersebut.

"Yang tidak setuju sebanyak 50,4 persen, yang setuju 34,8 persen, dan yang tidak tahu atau tidak jawab 14,8 persen," ujar Rico dalam pemaparan hasil survei secara daring, dikutip Rabu (25/2/2026).

Ia menambahkan, salah satu temuan krusial dalam survei ini adalah persepsi responden mengenai kemungkinan dominasi negara tertentu di dalam BoP. Hasilnya, 67,7 persen responden menyatakan setuju

bahwa Board of Peace lebih memberi keuntungan kepada Amerika Serikat dan Israel ketimbang Palestina.

Di sisi lain, survei yang sama menunjukkan 55,7 persen responden masih meyakini pemerintah Indonesia tetap konsisten membela Palestina. Sementara 31,7 persen menyatakan tidak percaya.

"Pemerintah ini sebenarnya masih punya modal sosial yang cukup ya sebagai pemerintahnya. Modal sosial yang cukup untuk melakukan adjustment atau perbaikan terhadap situasi," jelas Rico.

Survei Median dilaksanakan pada 10-14 Februari 2026 dengan metode penyebaran kuesioner berbasis Google Form kepada 1.200 pengguna aktif media sosial berusia 17 hingga 60 tahun di seluruh Indonesia.

Rico juga mengungkapkan adanya kekhawatiran publik terhadap dampak keanggotaan Indonesia di BoP terhadap sikap politik luar negeri

terkait Palestina. "Sebanyak 66,2 persen responden menyatakan khawatir keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace akan melemahkan konsistensi dukungan terhadap Palestina," ucapnya.

Mengenai alasan penolakan, ia menjelaskan sebagian responden memandang BoP sebagai instrumen kepentingan geopolitik tertentu. Alasan terbesar penolakan muncul karena forum tersebut dianggap sebagai bagian dari upaya Amerika Serikat dan Israel untuk menguasai Gaza dan wilayah Palestina yang dinilai belum merdeka.

Board of Peace sebelumnya diperkenalkan sebagai forum internasional yang bertujuan mendorong penyelesaian konflik Palestina-Israel. Pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya untuk ambil bagian dalam forum itu, termasuk melalui pengiriman pasukan perdamaian serta dukungan pembiayaan. (wid,ist/dya)

MK DIDESAK LARANG KELUARGA PRESIDEN MAJU PILPRES

Dua orang pengacara, Raden Nuh dan Dian Amalia, mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonan tersebut, mereka meminta agar MK menetapkan larangan bagi kerabat sedarah maupun semenda dari presiden dan wakil presiden yang masih menjabat untuk ikut serta dalam Pemilihan Presiden. Pembatasan itu diusulkan berlaku baik untuk pencalonan sebagai presiden maupun sebagai wakil presiden.

Gugatan ini teregistrasi dengan nomor perkara 81/PUU-XXXIV/2026 pada Selasa, 24 Februari 2026. Adapun ketentuan yang digugat ialah Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini antara lain memuat tentang persyaratan calon presiden dan wakil presiden, seperti harus WNI, tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah dipidana, dan lain sebagainya.

Merujuk pada berkas permohonan yang diakses dari laman resmi MK, pemohon menilai persyaratan dalam Pasal 169 UU Pemilu memungkinkan bagi setiap presiden yang sedang menjabat untuk mengusung anak, adik, anggota keluarga, serta kerabat dekat sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dalam pemilu presiden di mana presiden itu sedang menjabat.

"Jika hal ini terjadi sama saja dengan menegasikan prinsip objektivitas hukum di mana pasti akan tercipta kondisi di mana hukum digunakan sebagai alat (instrumentalistik) untuk melanggar kekuasaan keluarga,"



(Ilustrasi) MK diminta melarang kerabat sedarah maupun semenda dari presiden dan wakil presiden yang masih menjabat untuk ikut serta dalam Pemilihan Presiden.(dok)

kata penggugat dalam dalilnya pada berkas permohonan dilihat Rabu (25/2/2026).

Selain itu, menurut pemohon, Pasal 169 UU Pemilu juga bertentangan dengan Pasal 28 D Ayat (3) UUD 1945, karena berpotensi melahirkan ketimpangan sistemik dalam kandidat pemilu pilpres. Pemohon menyebut kandidat yang merupakan keluarga

presiden atau wakil presiden aktif secara otomatis memiliki akses terhadap state resources atau sumber daya negara.

Dalam dalilnya, pemohon juga menilai tidak dimuatnya larangan untuk keluarga presiden mencalonkan diri dalam Pasal 169 UU Pemilu melanggar prinsip negara yang mengharuskan negara hukum

POIN-POIN UTAMA GUGATAN UJI MATERI UU PEMILU TERKAIT PELARANGAN KELUARGA PRESIDEN MAJU PILPRES

Identitas Perkara

- Pemohon: Raden Nuh & Dian Amalia
- Objek: Pasal 169 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- Nomor: 81/PUU-XXXIV/2026
- Diajukan ke: Mahkamah Konstitusi

Pokok Permohonan

- Meminta larangan keluarga sedarah/semenda Presiden atau Wapres aktif maju sebagai Capres/Cawapres.
- Berlaku selama Presiden/Wapres masih menjabat.
- Tambahan norma: pencalonan wajib bebas konflik kepentingan, termasuk karena hubungan keluarga dengan petahana.

Alasan Gugatan

POLITIK KELUARGA

- Pasal 169 dinilai membuka jalan dinasti politik.
- Berpotensi jadi alat pelanggaran kekuasaan.

BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

- Dianggap melanggar Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
- Berpotensi menciptakan ketimpangan antar kandidat.

AKSES SUMBER DAYA NEGARA

- Keluarga petahana dinilai punya akses struktural lebih besar.
- Bisa memengaruhi fairness kontestasi.

KONFLIK KEPENTINGAN

- Negara hukum wajib mencegah conflict of interest.
- Cukup ada potensi atau "appearance of conflict" untuk merusak legitimasi.

DPR Buka Peluang

Undang Partai Non-Parlemen Bahas Revisi UU Pemilu

KOMISI II Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan bahwa pelibatan publik secara luas akan menjadi faktor penentu dalam memperkuat substansi revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya telah secara aktif mengundang berbagai pemangku kepentingan di bidang kepemiluan, baik perorangan maupun institusi, guna menyampaikan pandangan dan masukan terkait sistem pemilu.

"Forum penyerapan aspirasi ini akan terus dilakukan setelah reses selesai," ujar Rifqinizamy dikutip Rabu (25/2/2026).

Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 serta ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, proses legislasi diwajibkan memenuhi prinsip partisipasi bermakna.

Rifqinizamy menegaskan, dalam tahapan pembahasan revisi ini, Komisi II DPR berupaya konsisten menjalankan prinsip tersebut agar berbagai persoalan strategis dan desain krusial kepemiluan dapat dirumuskan secara komprehensif.

Selain mengundang pegiat dan pemerhati kepemiluan, ia mengungkapkan Komisi II juga membuka peluang menghadirkan partai politik non-parlemen untuk menyampaikan pandangan dalam proses revisi UU Pemilu.

"Kami memastikan pikiran dan pandangan mereka akan menjadi bagian dari revisi Undang-Undang Pemilu yang kami bahas," ujar politikus Partai NasDem tersebut.

Sebelumnya, pada 20 Januari lalu, Komisi II DPR secara resmi memulai rapat pembahasan revisi UU Pemilu. Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, menyebut terdapat sejumlah isu penting yang dibahas bersama akademisi dan pegiat pemilu.

"Salah satunya adalah parliamentary threshold sebagai perintah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-

XVIII/2023," kata politikus PDI Perjuangan itu di Kompleks DPR, MPR, dan DPD seusai rapat.

Ia menilai, ambang batas parlemen menjadi isu krusial dalam revisi UU Pemilu kali ini, sekaligus bagian dari upaya pembenahan sistem pemilu ke depan.

Di sisi lain, Sekretariat Bersama Gerakan Keadaulatan Suara Rakyat (Gerakan Keadaulatan Suara Rakyat) atau GKSRT tengah menyiapkan agenda diskusi publik yang berfokus pada besaran angka serta dampak (mudharat) parliamentary threshold. Hasil diskusi tersebut rencananya akan diserahkan kepada para legislator sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan revisi UU Pemilu.

GKSRT diketahui beranggotakan perwakilan dari delapan partai non-parlemen, salah satunya Partai Hanura. Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi, Akhmad Muqowam, menilai diskusi tersebut penting mengingat besarnya jumlah suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi dari satu pemilu ke pemilu berikutnya.(wid,tmo/dya)

membatasi kekuasaan dan mencegah konflik kepentingan.

Menurut pemohon, dalam ranah hukum publik, konflik kepentingan tidak perlu terjadi secara faktual untuk dianggap berbahaya. "Cukup dengan adanya potensi atau penampakan (appearance) konflik kepentingan sudah dapat mencederai legitimasi hukum," katanya.

Atas dasar itu, pada petitumnya, pemohon meminta hakim MK menyatakan Pasal 169 UU Pemilu ini bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Bahwa persyaratan pencalonan presiden dan atau wakil presiden wajib bebas dari konflik kepentingan yang bersumber dari hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang sedang menjabat." (tin,ant,kum/dya)

TELUSURI FEE PROYEK 10% MAIDI, KPK 'GARAP' DERETAN PEJABAT KOTA MADIUN

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkannya penyidikan dugaan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Penyidik mendalami aliran dana fee proyek yang diduga mengalir untuk kepentingan Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi, dengan kisaran 4 hingga 10 persen dari nilai anggaran proyek di Dinas PUPR Kota Madiun.

Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan sejumlah pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Dinas PUPR Kota Madiun.

"Semua saksi hadir. Penyidik mendalami para saksi terkait dugaan adanya fee proyek Dinas PUPR untuk kepentingan Wali Kota, yang berkisar antara 4-10 persen," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).

Dalam keterangan terpisah, Budi juga menyampaikan, "Para saksi didalami terkait dengan pelaksanaan proyek-proyek yang ada di Dinas PUPR Madiun yang diduga ada sejumlah aliran fee proyek yang diperuntukkan untuk Walikota, berkisar di angka 4-10 persen," ujarnya melalui keterangan tertulis.

Selain menelusuri besaran fee, penyidik juga mendalami



kemungkinan adanya pengondisian proyek sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

"Mendalami apakah juga ada pengondisian-pengondisian yang dilakukan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan dari proyek pengadaan tersebut," ucap Budi.

Saksi yang diperiksa berasal dari internal Dinas PUPR Kota Madiun, yakni Dwi Setyo Nugroho selaku Kabid PSDA; Agus Tri Sukanto selaku Kabid Bina Marga; Guntur Yan Putranto dari Tim Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; Hesti Setyorini selaku Kabid Cipta Karya; Riski Septiyanto selaku Katim

Kerja PBG Bidang Cipta Karya; serta Seno Bayu Murti selaku Katim Penataan Bangunan dan Lingkungan Bidang Cipta Karya.

Sebelumnya, KPK juga menyebut enam saksi telah diperiksa di Kantor KPPN Madiun untuk mengurai dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta penerimaan gratifikasi.

Kasus ini mencuat melalui rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada pertengahan Januari 2026. Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni

Maidi, Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Thariq Megah, serta pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Maidi, Rochim Ruhdiyanto.

Perkara bermula pada Juli 2025. Maidi diduga mengarahkan pengumpulan uang melalui Kepala DPMPSTP dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun kepada pengurus Yayasan STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun.

Dalam proses itu, pihak yayasan diminta menyerahkan Rp350 juta dengan dalih dana CSR terkait izin akses jalan. Uang tersebut kemudian ditransfer kepada Rochim Ruhdiyanto melalui rekening CV Sekar Arum.

Tak hanya itu, penyidik menemukan dugaan pemerasan lain berupa permintaan fee dalam penerbitan izin usaha kepada pelaku usaha hotel, minimarket, dan waralaba, serta permintaan Rp600 juta kepada pihak pengembang.

KPK juga mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi proyek pemeliharaan jalan paket II senilai Rp5,1 miliar dengan fee sekitar Rp200 juta. Selain itu, Maidi disebut menerima gratifikasi lain sepanjang 2019 hingga 2022 dengan total Rp1,1 miliar. Secara keseluruhan, total dugaan pemerasan dan gratifikasi yang diterima Maidi mencapai sekitar Rp2,25 miliar.

Atas dugaan tersebut, Maidi dan Rochim disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2021 juncto Pasal 20 juncto Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (gus,ist/dya)(gus,ist/dya)

KPK DUGA TIMSES SUDEWO ATUR PEMENANG LELANG PROYEK DI PATI, 13 SAKSI DIPERIKSA



JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik peran Tim Sukses (Timses) Bupati Pati nonaktif Sudewo saat Pilkada 2024 dalam pengkondisian sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di wilayah Kabupaten Pati.

KPK menduga Timses Sudewo yang juga sebagian terlibat dalam Tim 8 mengatur pemenang lelang proyek atau pelaksanaan proyek oleh

kelompok tertentu.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dugaan pengkondisian proyek tersebut didalami penyidik dari pemeriksaan sejumlah saksi pada hari ini, Rabu (25/2/2026) di Polrestabes Semarang.

Dari 13 saksi yang diperiksa, 5 di antaranya merupakan Timses Sudewo dan sisanya sebagian besar kepala desa di wilayah Kabupaten Pati.

"Penyidik meminta keterangan kepada para timses atau tim 8 dari saudara SDW (Sudewo ini berkaitan dengan pengadaan-pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati karena diduga pengadaan-pengadaan di wilayah Kabupaten Pati juga diduga ada pengkondisian," ujar Budi di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).

"Ada plotting-plotting yang dilakukan untuk memenangkan pihak-pihak tertentu dalam proses ataupun pelaksanaan dari proyek-proyek pengadaan tersebut," kata Budi menambahkan.

KPK juga mendalami keterangan kepala desa yang turut menjadi saksi mengenai proses-proses pengisian jabatan calon perangkat desa. Termasuk mengusut soal perintah Sudewo melalui Tim 8 untuk mengumpulkan uang dari calon perangkat desa.

"Juga dikonfirmasi mengenai perintah untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para calon

perangkat desa di mana perintah tersebut dari saudara SDW yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," tandas Budi.

Sebelumnya, KPK menangkap Sudewo bersama tujuh orang lainnya dalam operasi tangkap tangan pada Senin (19/1/2026). Setelah pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, empat orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Sudewo.

Empat tersangka tersebut yakni Sudewo bersama tiga kepala desa, yaitu Abdul Suyono selaku Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Jaken, Sumarjiono selaku Kepala Desa Arumanis Kecamatan Jaken, serta Karjan selaku Kepala Desa Sukorukun Kecamatan Jaken.

Keempat tersangka diduga secara bersama-sama melakukan pemerasan terhadap calon perangkat desa. Mereka menetapkan tarif antara Rp165 juta hingga Rp225 juta per orang, meningkat dari kisaran awal Rp125 juta hingga Rp150 juta.

KPK menyebut praktik pemerasan tersebut disertai ancaman. Calon perangkat desa yang tidak memenuhi permintaan pembayaran disebut tidak akan mendapat kesempatan pengisian jabatan pada tahun-tahun berikutnya. (wid,rla/dya)

CISADANE TERCEMAR PESTISIDA, KLH SIAPKAN GUGATAN

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan siap menempuh jalur hukum terhadap perusahaan pemilik gudang pestisida yang terbakar di Tangerang Selatan, menyusul dugaan pencemaran Sungai Cisadane. Saat ini, KLH masih menunggu hasil uji laboratorium sebagai dasar untuk memastikan unsur pelanggaran dan memperkuat gugatan.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) masih menunggu hasil laboratorium untuk menggugat perusahaan terkait pestisida yang cemari Sungai Cisadane. Pencemaran itu terjadi setelah gudang pestisida di Tangerang Selatan terbakar.

"Cisadane ini sekali lagi kami masih menunggu hasil lab yang terkait dengan pestisida. Karena lab pestisida ini di bawah pengawasan dari Kementerian Pertanian. Labnya itu khusus, ada dua lab yaitu lab IPB," ujar Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq kepada wartawan di Balai Sarbini, Jakarta pada Rabu (25/2/2026).

Hanif mengatakan, nantinya hasil lab tersebut akan digunakan untuk menghitung kerugian dalam gugatan perdata kepada perusahaan bersangkutan.

"Kalau itu (hasil lab pestisida) sudah keluar maka kita akan memasukkan besaran komponen



Puluhan ikan ditemukan mati mengapung di Sungai Cisadane, Tangerang. (Dok)

variabel itu di dalam modeling kita. Dan ini kita akan langsung lakukan gugatan perdata," ujarnya.

Pencemaran lingkungan di Sungai Cisadane terjadi karena kebakaran gudang pestisida di kawasan Taman Tekno, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan pada Senin (9/2/2026).

Gudang tersebut milik PT Biotek Saranatama. Lokasinya di Kawasan Pergudangan Taman Tekno BSD Serpong, Blok K3 Nomor 37, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Perusahaan tersebut menyimpan pestisida jenis cypermetrin dan profenofos, yang umum digunakan untuk

mengendalikan berbagai hama tanaman.

Area Sungai Cisadane yang tercemar kurang lebih 22,5 kilometer. Itu masuk dalam wilayah Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang.

Pemerintah daerah di Banten hingga DKI Jakarta bergerak cepat merespons dugaan pencemaran Sungai Cisadane akibat kebakaran gudang pestisida di kawasan Taman Tekno, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan.

Sejumlah langkah darurat ditempuh, mulai dari pengambilan sampel air untuk uji laboratorium, imbauan pembatasan penggunaan air sungai, hingga penutupan aliran menuju kali-kali di Jakarta.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tangerang memastikan telah mengambil sampel air Sungai Cisadane untuk diuji di laboratorium. Proses pengujian disebut membutuhkan waktu sekitar dua pekan guna mengetahui kandungan cemaran secara rinci, termasuk komposisi zat kimia dan potensi bahayanya bagi lingkungan maupun kesehatan manusia.

Kepala Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) DLH Kabupaten Tangerang, Ari Margo, mengimbau masyarakat yang berada di sepanjang daerah aliran Sungai Cisadane dan anak-anak sungainya untuk sementara tidak menggunakan air sungai untuk kebutuhan mandi, cuci, maupun konsumsi. Imbauan itu bersifat pencegahan hingga hasil uji laboratorium keluar dan kondisi dinyatakan aman.

Menurut dia, dampak pencemaran berpotensi mengalir hingga wilayah hilir di Kabupaten Tangerang seperti Teluknaga, Kosambi, Pakuhaji, dan Sepatan. Karena itu, pemantauan tidak hanya dilakukan di titik awal dugaan cemaran, tetapi juga di sejumlah titik hilir guna memastikan sebaran zat kimia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengambil langkah antisipatif. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menginstruksikan jajarannya untuk menutup aliran air dari Sungai Cisadane yang mengarah ke kali-kali di Jakarta.

Menurut Rano, keputusan itu diambil sebagai langkah perlindungan dini agar cemaran kimia tidak meluas dan berdampak pada masyarakat Jakarta. Ia mengungkapkan, perintah penutupan sudah diberikan sejak dini hari setelah menerima laporan mengenai kontaminasi kimia di Sungai Cisadane. (wid,ist,kum/dya)

Usulan Bangun Rawa Buatan untuk Pemulihan



KLH segel gudang pestisida di Tansel yang terbakar dan mencemari Sungai Cisadane. Foto: Dok. Istimewa

DAMPAK dugaan pencemaran pestisida di Sungai Cisadane tidak hanya memicu langkah darurat pemerintah daerah, tetapi juga memunculkan wacana pemulihan ekosistem jangka panjang. Sejumlah ikan masih terlihat mati dan mengapung terbawa arus pada Rabu (11/2/2026), menandakan tekanan serius terhadap kualitas air dan kehidupan biota sungai.

Pengamat lingkungan, Ivan, menilai salah satu pendekatan pemulihan yang bisa dipertimbangkan adalah membangun kawasan semacam rawa buatan

(constructed wetland) di bantaran sungai.

Konsep ini memungkinkan air tercemar melewati area bervegetasi dan berlumpur terlebih dahulu sehingga proses alami seperti filtrasi oleh tanah, mikroorganisme, dan tanaman air, dapat membantu menurunkan kadar polutan sebelum air kembali mengalir ke badan sungai utama.

"Jadi (air yang tercemar) akan melewati rawa-rawa itu supaya pelan-pelan bisa membantu mengurangi polutan di tanah atau di dasar sungai. Cuma untuk bikin itu

butuh waktu, enggak bisa dalam beberapa bulan," ujarnya.

Menurut dia, pemulihan ekosistem sungai tidak bisa instan. Selain menunggu hasil uji laboratorium untuk mengetahui jenis dan kadar bahan kimia yang mencemari, pemerintah daerah juga perlu menyusun rencana kerja terukur dalam jangka pendek dan menengah. Tanpa peta jalan yang jelas, kekhawatiran publik akan terus menguat.

Ivan berharap pemerintah daerah menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat mengenai jenis pestisida atau bahan kimia apa yang bocor, berapa banyak volumenya, serta sejauh mana sebarannya di sepanjang aliran Sungai Cisadane. Transparansi dinilai penting agar masyarakat memahami risiko dan dapat mengambil langkah perlindungan yang tepat.

Selain itu, ia menegaskan perlunya larangan tegas dan jelas terkait pemanfaatan air sungai dalam periode tertentu. "Pemda juga mesti menegaskan kepada publik bahwa masyarakat tidak boleh sama sekali memanfaatkan air sungai dalam jangka waktu tertentu," katanya. (wid,kum,ist/dya)

Capai 95%, Imunisasi Campak di Kota Malang Penuhi Herd Immunity

MALANG - Capaian imunisasi massal campak atau Outbreak Response Immunization (ORI) di Kota Malang telah menembus angka 95,06 persen. Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat memastikan angka itu telah memenuhi ambang batas kekebalan kelompok atau herd immunity.

Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, menyampaikan capaian tersebut diperoleh setelah dilakukan berbagai strategi percepatan, termasuk melalui jemput bola bagi sasaran yang belum hadir saat penjadwalan imunisasi. "Capaannya sudah 95,06 persen," ujarnya, Rabu (25/2/2026).

Husnul menjelaskan, secara epidemiologis, herd immunity campak dapat terbentuk apabila minimal 95 persen sasaran telah tervaksinasi. Dengan tercapainya angka tersebut, risiko penularan campak, termasuk dari luar wilayah, dapat ditekan karena telah terbentuk perlindungan kelompok.

"Kalau sudah mencapai 95 persen, maka risiko penularan campak dari luar wilayah bisa ditekan. Karena

sudah terbentuk perlindungan kelompok itu," jelasnya.

Husnul menambahkan, capaian tersebut tidak lepas dari peran aktif jajaran puskesmas. Yang melakukan kunjungan rumah kepada anak-anak yang tidak hadir saat pelaksanaan ORI di sekolah maupun fasilitas kesehatan.

Menurutnya, ketidakhadiran sebagian anak bukan disebabkan penolakan dari orang tua. Faktor utamanya lebih kepada kekhawatiran anak setelah menerima informasi dari teman sebaya terkait rasa sakit saat disuntik.

"Bukan karena orang tua menolak imunisasi. Tetapi karena mendapatkan info dari teman-temannya kalau jangan masuk sekolah nanti disuntik, sakit," terangnya.

Husnul menegaskan ORI campak menasar anak usia 9 bulan hingga 13 tahun tanpa melihat status imunisasi sebelumnya. Anak yang telah mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), menurutnya tetap diwajibkan mengikuti ORI. Karena program ini merupakan bagian dari respon terhadap kejadian wabah.

Di tengah pelaksanaan ORI yang

masih berlangsung hingga 28 Februari mendatang, Dinkes juga memastikan tidak ada temuan kasus campak baru. Kondisi ini dinilai sebagai indikator positif dari efektivitas pelaksanaan imunisasi massal.

Lebih lanjut, Husnul menjelaskan pelaksanaan ORI pada awal 2026 ini merupakan tindak lanjut atas temuan kasus pada 2025. Tercatat sekitar 300 kasus suspek campak tersebar di lima kecamatan di Kota Malang.

"Setelah pemeriksaan lanjutan, hingga Desember 2025 terkonfirmasi 17 kasus campak di tiga kecamatan," kata Husnul.

Rinciannya, Kecamatan Kedungkandang sebanyak 10 kasus,



Ilustrasi: Imunisasi massal menyasar para siswa di SDN Percobaan 2 Kota Malang, Kecamatan Sukun. (dok. ist/instagram sdnp2_official)

Kecamatan Sukun 3 kasus, dan Kecamatan Lowokwaru 4 kasus. Berdasarkan temuan tersebut, Dinkes Kota Malang menerima Surat Edaran dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk menindaklanjuti melalui pelaksanaan ORI di wilayah dengan temuan kasus. (Santi/Dya)

Permintaan Ekspor Kopi Capai 45 Ribu Ton, Kabupaten Malang Baru Penuhi Sepertiganya



Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang, Avicenna Medisica. (Santi/Lentera)

MALANG- Permintaan ekspor kopi dari Kabupaten Malang menunjukkan tren peningkatan dalam 2 tahun terakhir. Namun di balik lonjakan tersebut, kapasitas produksi lokal ternyata masih jauh dari kata cukup.

Dari total permintaan ekspor tahun 2025 yang mencapai sekitar 45 ribu ton, Kabupaten Malang baru

mampu memenuhi sekitar sepertiganya atau 15 ribu ton.

"Di tahun 2024, permintaan sekitar 40 ribu ton, kemudian di 2025 meningkat menjadi 45 ribu ton. Tapi petani kita baru bisa suplai sekitar 15 ribu ton. Selebihnya, sekitar 30 ribu ton diambil dari daerah luar seperti Blitar dan Pasuruan," ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang, Avicenna Medisica Sani Putera, Rabu (25/2/2026).

Diakui, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi pasar ekspor dan kapasitas produksi daerah. Meskipun menurut Avicenna, kopi yang dipasok dari luar daerah tetap dipasarkan dengan brand Kabupaten Malang,

yakni Kopi Dampit, ketika dikirim ke negara tujuan.

Lebih lanjut, menurutnya produk kopi tersebut umumnya diekspor dalam bentuk green bean atau ose. Namun demikian, tidak semua wilayah di Kabupaten Malang memiliki potensi ekspor. Hingga saat ini, kata Avicenna sentra kopi yang berorientasi ekspor berada di wilayah Ampelgading, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, dan Dampit atau yang dikenal dengan Kawasan Amstirdam. Serta di wilayah Wonosari, Kromengan, dan Ngajum.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Avicenna mengaku pihaknya terus melakukan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi difokuskan pada perbaikan teknik budidaya guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen.

"Sementara ekstensifikasi dilakukan dengan memperbaiki lahan-lahan kopi yang rusak agar dapat kembali produktif," katanya.

Selain persoalan lahan dan budidaya, menurut Avicenna tantangan lain juga

terletak pada aspek sumber daya manusia (SDM). Dikatakannya, minat generasi muda untuk terjun di sektor pertanian, khususnya kopi, masih perlu ditingkatkan.

"Kami terus mendorong anak-anak muda, petani-petani milenial supaya mau terjun di pertanian kopi. Karena keberlanjutan produksi juga sangat tergantung pada regenerasi petani," katanya.

Di sisi lain, berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Malang, kopi menyumbang sekitar 25 persen dari total realisasi ekspor daerah. Pada 2025, total nilai ekspor Kabupaten Malang tercatat sebesar 462,23 juta USD, meningkat dari 460,13 juta USD pada 2024.

Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Malang, Kamilin, menyebutkan meski kontribusi kopi cukup signifikan, pemenuhan permintaan ekspor tidak semudah komoditas lain seperti rokok yang mendominasi lebih dari separuh total ekspor daerah. (Santi/Dya)

ARAB SAUDI TUTUP TOTAL KERAN IMPOR UNGGAS DARI INDONESIA

Arab Saudi menutup total keran impor unggas dan telur konsumsi dari 40 negara. Indonesia termasuk di dalamnya. Kebijakan itu diumumkan oleh Saudi Food and Drug Authority (SFDA) sebagai langkah pencegahan untuk menjaga keamanan pangan nasional dan melindungi kesehatan publik.

Keputusan tersebut tidak berdiri sendiri. Otoritas Saudi juga menjatuhkan larangan parsial terhadap wilayah tertentu di 16 negara lain. Dengan skema ini, hanya provinsi atau kota tertentu yang dibatasi, sementara wilayah lain masih dapat mengekspor dengan syarat tertentu.

Mengutip media Saudi, Okaz dan Saudi Gazette, Rabu (25/2/2026) kebijakan ini disebut sebagai bagian dari penguatan standar keamanan pangan di pasar domestik. SFDA menegaskan daftar negara terdampak bersifat dinamis. Evaluasi dilakukan secara berkala mengikuti perkembangan situasi epidemiologi global.

Di balik kebijakan tersebut, ada kekhawatiran lama yang kembali mencuat yaitu penyebaran penyakit unggas lintas negara. SFDA menyebut peningkatan kewaspadaan terhadap wabah flu burung dengan tingkat patogenik tinggi (highly pathogenic avian influenza) serta penyakit Newcastle (Newcastle disease virus/NDV) sebagai pertimbangan utama.

Dalam pernyataannya, otoritas itu menegaskan larangan diterapkan



(Ilustrasi) Peternak memanen telur di salah satu peternakan ayam petelur di Gunung Sindur, Jawa Barat. (Dok.ist)

untuk “melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan keamanan pangan di pasar lokal.” Kebijakan tersebut, kata mereka, juga mencerminkan komitmen menjaga kualitas produk pangan yang beredar di dalam negeri.

Sebagian negara yang kini masuk daftar hitam sudah lebih dulu dilarang sejak 2004. Negara lain ditambahkan secara bertahap berdasarkan hasil penilaian risiko dan laporan internasional mengenai wabah penyakit hewan.

Indonesia tergolong dalam kategori larangan penuh. Artinya,

unggas dan telur konsumsi asal Indonesia tidak dapat masuk ke pasar Saudi untuk sementara waktu.

Selain Indonesia, negara yang dikenai larangan total mencakup Afghanistan, Azerbaijan, Jerman, Iran, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Bangladesh, Taiwan, Djibouti, Afrika Selatan, China, Irak, Ghana, Palestina, Vietnam, Kamboja, Kazakhstan, Kamerun, Korea Selatan, Korea Utara, Laos, Libya, Myanmar, Inggris, Mesir, Meksiko, Mongolia, Nepal, Niger, Nigeria, India, Hong Kong, Jepang, Burkina Faso, Sudan, Serbia, Slovenia, Pantai Gading, dan

DAFTAR NEGARA YANG DIKENAI PEMBATASAN IMPOR UNGGAS DAN TELUR OLEH SAUDI FOOD AND DRUG AUTHORITY (SFDA)

Larangan Total (40 Negara)

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Afghanistan | - Korea Utara |
| - Azerbaijan | - Laos |
| - Jerman | - Libya |
| - Indonesia | - Myanmar |
| - Iran | - Inggris |
| - Bosnia & Herzegovina | - Mesir |
| - Bulgaria | - Meksiko |
| - Bangladesh | - Mongolia |
| - Taiwan | - Nepal |
| - Djibouti | - Niger |
| - Afrika Selatan | - Nigeria |
| - China | - India |
| - Irak | - Hong Kong |
| - Ghana | - Jepang |
| - Palestina | - Burkina Faso |
| - Vietnam | - Sudan |
| - Kamboja | - Serbia |
| - Kazakhstan | - Slovenia |
| - Kamerun | - Pantai Gading |
| - Korea Selatan | - Montenegro |

Larangan Parsial (16 Negara - wilayah tertentu saja)

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| - Australia | - Kanada |
| - Amerika Serikat | - Malaysia |
| - Italia | - Austria |
| - Belgia | - Republik Demokratik Kongo |
| - Bhutan | - Rumania |
| - Polandia | - Zimbabwe |
| - Denmark | - Togo |
| - Prancis | |
| - Filipina | |

Montenegro.

Sementara itu, 16 negara lain dikenai pembatasan parsial, di antaranya Australia, Amerika Serikat, Italia, Belgia, Bhutan, Polandia, Denmark, Prancis, Filipina, Kanada, Malaysia, Austria, Republik Demokratik Kongo, Rumania, Zimbabwe, dan Togo. Dalam skema ini, larangan hanya berlaku untuk wilayah tertentu yang dinilai berisiko.

Langkah tersebut menunjukkan pendekatan selektif berbasis risiko. Otoritas Saudi memantau perkembangan wabah di tiap wilayah sebelum menentukan cakupan pembatasan.

Meski terdengar menyeluruh, larangan ini tidak sepenuhnya menutup akses produk unggas dari negara terdampak. SFDA membuka ruang pengecualian bagi produk yang telah melalui proses pemanasan atau metode pengolahan tertentu.

Namun pengecualian itu tidak otomatis. Produk harus diproses dengan metode yang terbukti mampu menghilangkan virus flu burung dan Newcastle disease. Selain itu, seluruh persyaratan kesehatan, regulasi, serta standar keamanan pangan Saudi tetap berlaku.(wid,oks,gaz/dya)

Pengusaha Sebut Dampaknya Minim

LARANGAN impor unggas dan telur oleh Arab Saudi terhadap Indonesia dinilai tidak mengguncang kinerja ekspor nasional. Dampaknya disebut terbatas, meski menyisakan tekanan bagi pelaku usaha tertentu.

Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro mengatakan kebijakan tersebut memang menutup peluang sebagian eksportir yang selama ini membidik pasar Arab Saudi. Namun, kontribusi komoditas unggas dan telur terhadap total ekspor Indonesia ke negara itu relatif kecil.

“Eksportir ayam, unggas, atau telur pasti selama ini berharap memasuki pasar Arab Saudi kehilangan peluang, meskipun nilainya mungkin relatif kecil dibanding total ekspor nasional kita atau ekspor lainnya,” kata Toto, Rabu (25/2/2026).

Menurut Toto, dampak paling

terasa justru pada eksportir kecil dan menengah yang menargetkan pasar Timur Tengah. Permintaan berpotensi berkurang atau tertunda, terutama menjelang musim haji, periode ketika kebutuhan pangan meningkat.

Ia menjelaskan, pembatasan terhadap produk segar mendorong pelaku usaha mengalihkan strategi ke produk olahan seperti telur bubuk atau produk yang telah dipasteurisasi. Opsi ini memungkinkan komoditas tetap memenuhi standar suhu dan kesehatan yang ditetapkan otoritas Saudi, tetapi memerlukan investasi tambahan.

“Bagi pelaku usaha yang sudah investasi ekspor, mereka akan menghadapi tekanan ekonomi karena tidak mendapat akses ke pasar Saudi,” ujarnya.

Kendati demikian, GPEI menilai larangan tersebut tidak signifikan

terhadap neraca perdagangan Indonesia secara keseluruhan. Ekspor Indonesia ke Arab Saudi nilainya mencapai lebih dari US\$2 miliar, namun komoditas unggas dan telur bukan kategori utama.

“Tidak spesifik unggas telur itu berapa, karena tidak merupakan kategori utama dalam daftar ekspor utama yang didominasi oleh kendaraan, minyak nabati, kayu, dan produk olahan lainnya,” tutur Toto.

Ia menambahkan, dari sisi domestik, pembatasan ekspor berpotensi menjaga pasokan dalam negeri tetap tinggi sehingga tekanan harga dapat lebih stabil.

Ke depan, GPEI menyarankan diversifikasi pasar ke kawasan lain, mulai dari ASEAN, Afrika hingga Eropa. Penguatan standardisasi dan sertifikasi internasional juga dinilai krusial agar pelaku usaha siap memasuki pasar dengan regulasi ketat.(wif,bis/dya)

Sukun Superfood Tropis, Bisa Jadi Pengganti Nasi dan Roti

Selama ini jus jeruk dikenal luas sebagai bahan camilan seperti keripik dan gorengan di Indonesia. Di beberapa negara disebut sebagai superfood, yaitu makanan yang dinilai sangat kaya nutrisi dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh.

Sukun (*Artocarpus Altilis*) adalah buah tropis berukuran besar dengan kulit kasar dan daging buah yang empuk. Secara tekstur sukun yang dimasak mirip dengan roti atau kentang, sehingga dalam sejumlah budaya tropis sering dijadikan sebagai makanan pokok.

Popularitas sukun meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan perhatian dunia terhadap pola makan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Media makanan global seperti Food & Wine mengangkat buah ini sebagai contoh makanan tropis yang kaya nutrisi dan menarik untuk dikembangkan sebagai alternatif pangan sehari-hari.

Buah ini tumbuh subur di hampir seluruh wilayah tropis, termasuk Indonesia, kawasan Pasifik, Karibia, Afrika, dan Amerika Tengah. Di Amerika Serikat, khususnya di Hawaii, sukun dikenal dengan nama lokal ulu dan menjadi bagian dari tradisi kuliner setempat.

Di Indonesia sendiri, produksi sukun tersebar luas dari Jawa hingga luar Pulau Jawa, meskipun pemanfaatannya masih terbatas pada jajanan

lokal. Buah sukun kandungan nutrisinya banyak.

Sukun menyediakan karbohidrat kompleks yang dicerna lebih lambat oleh tubuh, sehingga memberi energi lebih stabil dibandingkan nasi putih dan roti olahan yang umumnya mengandung karbohidrat sederhana.

Serat dalam buah sukun juga membantu memperlancar pencernaan dan memberikan rasa kenyang lebih lama, aspek yang sering dihubungkan dengan pengendalian berat badan dan kesehatan metabolik.

Buah sukun kaya akan antioksidan seperti vitamin C dan fitonutrien lain yang membantu tubuh melawan radikal bebas dan mendukung sistem kekebalan tubuh.

Dalam tinjauan gizi internasional, buah ini bahkan dikatakan memiliki profil asam amino yang lengkap, termasuk kesembilan asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh, sesuatu yang tidak lazim ditemukan pada kebanyakan sumber karbohidrat nabati.

Sukun diolah agar bisa menggantikan peran nasi atau roti dalam menu sehari-hari. Caranya sangat beragam. Sukun yang dipanen saat masih muda atau setengah matang bisa direbus, dipanggang, atau digoreng sesuai selera.

Selain disajikan utuh, sukun juga bisa diolah menjadi tepung sukun yang fleksibel digunakan untuk membuat hidangan lainnya seperti sup,

tumisan, bahkan roti dan kue sehat.

Tepung sukun menawarkan pilihan gluten-free dan lebih kaya serat daripada tepung terigu biasa, sehingga menarik minat para pembuat makanan sehat dan komunitas bebas gluten.

Selain dimasak langsung, sukun dapat dicampurkan ke dalam resep tradisional untuk menggantikan nasi

atau roti dalam hidangan utama.

Misalnya, sukun rebus dapat dipadukan dengan sayuran atau lauk pauk sebagai pengganti nasi, atau tepung sukun dipakai sebagai bahan dasar pancake, muffin, hingga roti panggang yang lebih bernutrisi. (Nabillatul – Mahasiswa UINSA, berkontribusi dalam tulisan ini)

Ide Resep Olahan Sukun Sehat & Lezat

1. Sukun Kukus Sambal (Paling Sehat)

Sukun dikukus 15–20 menit hingga empuk, disajikan dengan sambal tomat atau kelapa. Tanpa minyak, nutrisinya tetap terjaga.

2. Bubur Sukun Kacang Hijau (MPASI/Diet)

Sukun kukus dan kacang hijau direbus lalu dihaluskan menjadi bubur. Bisa ditambah ASI/formula setelah hangat.

3. Sukun Goreng Geprek (Rendah Minyak)

Sukun direndam air garam, digoreng setengah matang, digeprek lalu digoreng kembali. Lebih sedikit menyerap minyak dibanding goreng tepung.

4. Camilan Sukun Panggang/Air Fryer

Sukun dilumuri sedikit minyak dan bumbu, lalu dipanggang di air fryer 180°C selama 15–20 menit hingga renyah.



Sukun Geprek Sambal



Sukun Panggang



Sukun Kacang Hijau



Sukun Kukus

Ilmuwan Berhasil Ungkap Proses Terbentuknya Berlian di Bumi

Sebagian besar berlian yang berada di permukaan Bumi berasal dari sebuah struktur gunung berapi yang di juluki dengan Kimberlit. Kimberlit merupakan pipa vulkanik yang berbentuk seperti wortel. Struktur ini meletus dari kedalaman mantel lebih dari 150 km dengan cepat dan laju kenaikannya sekitar 80 mil per jam, sebelum akhirnya meletus di permukaan.

Perjalanan yang menuju permukaan, magma menangkap fragmen batuan xenolit dan xeokristal. Peneliti dari pusat Heli Planet Universitas Oslo, Ana Anzulovic mengatakan bahwa batuan tersebut masih misterius sampai saat ini.

Anzulovic dan tim peneliti lainnya melakukan pembelajaran yang diterbitkan melalui jurnal Geology untuk memecahkan teka-teki struktur tersebut.

Mereka membuat model senyawa volatil seperti karbon dioksida dan air sehingga berdampak pada daya apung lelehan dari protokimberlit pada material yang berada disekitarnya.

Awalnya batuan itu terbentuk dari sesuatu yang tidak bisa diukur secara langsung. Jadi kita tidak tahu seperti apa lelehan protokimberlit atau lelehan induknya. Kita tahu perkiraannya, tetapi pada dasarnya batuan mengalami perubahan

signifikan dan kemudian terbentuk," kata Anzulovic dikutip dari Eureka Alert.

Tim peneliti memfokuskan penelitian pada Kimberlit Jericho yang berasal dari Kraton Slave di Kanada. Penelitian ini bertujuan untuk memahami komposisi lelehan induk kimberlit. Peneliti membuat model Kimia Kimberlit dengan memvariasikan kandungan CO₂ dan H₂O, mereka juga menggunakan perangkat lunak dinamika molekuler untuk mensimulasikan gaya antaratom serta melacak pergerakan lelehan kimberlit pada kedalaman di dalam bumi. Metode ini membantu menentukan

kepadatan lelehan dalam kondisi yang berbeda. Selain itu, hasil menunjukkan bahwa lelehan Kimberlit memiliki kepadatan yang cukup rendah sehingga dapat bergerak naik hingga mencapai permukaan bumi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa air berperan penting dalam meningkatkan difusi sehingga lelehan tetap cair dan mudah bergerak. Sementara itu, karbon dioksida membantu membentuk struktur lelehan pada tekanan tinggi. Namun, saat mendekati permukaan Bumi, karbon dioksida akan terlepas sebagai gas dan mendorong terjadinya erupsi.

Para peneliti menemukan bahwa Kimberlit Jericho membutuhkan sekitar 8,2 persen karbon dioksida agar dapat meletus. Tanpa kandungan tersebut, berlian akan tetap terperangkap di dalam mantel Bumi. (Ella-Mahasiswa UINSA, berkolaborasi dalam tulisan ini)

Jenis Berlian Langka

Berlian Merah:
Paling langka di dunia.

Berlian Merah Muda (Pink Diamond):
Sangat diburu kolektor.

Berlian Biru (Tipe IIb):
Mengandung boron, hanya sekitar 0,1% dari total berlian.

Berlian Hijau & Kuning:
Termasuk fancy color bernilai tinggi.



HARIAN
LETERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LETERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH I **LAMONGAN:** L HANDI I **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA I **KEDIRI:** GATOT SUNARKO I **JOMBANG :** SUTONO I **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO I **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO I **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN I **TRENGGALEK:** TINA W I **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN I **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN I **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN I **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Tren Estetika 2026 Paling 'Cutesy' Versi Pinterest

Tahun 2026 tidak hanya disambut dengan banyak harapan positif, tapi juga estetika manis. Menyingkir dari minimalisme, kini tren diprediksi berpaling ke hal-hal maksimalis. Mengekspresikan diri melalui fashion dan beauty dengan semakin berani. Pinterest pun sudah merilis **Pinterest Predicts 2026** di mana inspirasi-inspirasi yang paling banyak dicari tahun 2025 dalam platformnya diperkirakan akan mendefinisikan tahun ini.

Dunia kecantikan tidak pernah habis mempunyai tren-tren terbaru setiap harinya. Salah satu yang menjadi oatikan di era digital dan media sosial adalah platform Pinterest.

Estetika kecantikan yang diprediksi akan populer di 2026 menurut Pinterest. Mulai dari tampilan gothic, eksentrik, hingga stacking aroma parfum.

Vamp Romantic

Sinema yang kembali menggaungkan nuansa gothic akhirnya punya pengaruh ke dunia kecantikan. Inspirasi dark romantic makeup, vampire beauty, hingga gothic coffin nails banyak dicari

di Pinterest. Kalau kamu mau coba smokey eyes, dark nail art, dan goth hairstyle, ini saat yang tepat!

Glitchy Glam

Makeup yang terasa “janggal” punya daya tariknya tahun depan. Manicure tanpa harmoni, segala hal two-toned mulai dari lipstick sampai eyeshadow, detail asimetris, hingga tampilan makeup eksentrik akan curi perhatian.

Cool Blue

Walau Pantone Color 2026 menyebutkan putih “Cloud Dancer” jadi warna tahun depan, warna biru tetap punya ruang di hati banyak orang. Makeup serba cool-toned diperkirakan akan eksis tahun depan. Misalnya frosted makeup dan shade icy blue.

Extra Celestial

Inspirasi makeup bernuansa quirky lain yang nggak kalah menarik adalah Extra Celestial. Tren ini masuk ke dalam beberapa kategori, yaitu fashion dan beauty. Alien inspired makeup dan tampilan soft dewy dengan eyeshadow warna bulan akan jadi estetika yang fabulous!

Scent Stacking

Dari ranah parfum, layering aroma siap-siap semakin populer. Pancarkan keharuman yang paling khas dan sesuai karakter dengan Scent Stacking. Gen Z dan Milenial akan mulai mencari signature scent yang paling merepresentasikan dirinya, bahkan rela mencari parfum niche atau bespoke agar terkesan makin eksklusif.

Sementara, Estetika fashion cenderung maksimalis diprediksi Pinterest akan populer di 2026. Contohnya seperti Glamoratti, Poetcore, Gimme Gummy, dan Lace Up.

Glamoratti

Glamor menjauh dari kata “understated”. Estetika Glamoratti mendorong kamu untuk tampil percaya diri dengan segala hal bold dan tampak mewah. Tailored suits, chunky accessories, sculpted jacket adalah beberapa di antara fashion items yang akan memadati look maksimalis ala Glamoratti.

Brooched

Bros nggak hanya marak muncul di fashion show, tapi aksesoris ini juga diprediksi akan merajalela tahun depan. Bros bisa menjadi statement praktis untuk meningkatkan gaya. Menariknya, bros tidak hanya mencuri perhatian perempuan saja, tapi juga pria untuk dikenakan di kerah jas. Bros yang dicari pun cenderung bernuansa klasik dan vintage, seperti heirloom brooch untuk sentuhan ‘grandpa core’ elegant pada penampilan.

Poetcore

Dark academia? Not quite! Estetika Poetcore terasa lebih spesifik dengan fashion items yang melekat pada persona seorang penyair. Tas satchel, dasi, turtleneck, blazer vintage, loafers klasik, bahkan fountain pen.

Wilderkind

Wilderkind merujuk pada nuansa alam bebas yang diadopsi menjadi aksesoris manis pada penampilan. Perhiasan berbentuk serangga, nail art sayap kupu-kupu, motif-motif pakaian yang terinspirasi hewan, atau bunga eksotis yang jadi detail dimensional.

Gimme Gummy

Estetika bernuansa Y2K belum pudar, tapi akan semakin yummy tahun depan! Yup, estetika mulai dari aksesoris sampai nail art, akan punya warna-warni bak jelly. Bayangkan nail

art dengan visual seperti karet, perhiasan dengan tekstur lentur, atau bahkan case handphone yang penuh warna ceria.

Khaki Coded

Di ujung spektrum estetika multi warna, ada warna netral yang abadi. Gen Z dan Milenial akan bersandar pada warna khaki yang terinspirasi dari padang pasir. Fashion items basic seperti bermuda shorts, pleated trousers, kemeja linen, sampai jaket bernuansa utilitarian akan banyak dicari.

Laced Up

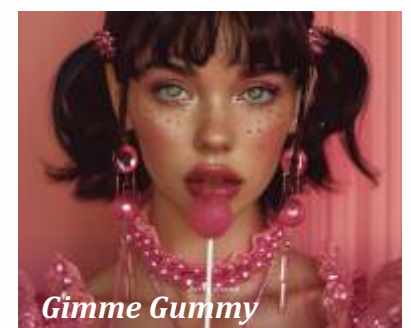
Material renda turut jadi primadona tahun depan. Tampilan elegan dengan sentuhan romantis, tekstur lace tidak hanya dicari untuk fashion seperti ikat pinggang, bandana, stocking, atau detail pada pakaian, tapi juga bisa menyatu sebagai nail art dan makeup. (wid,ist,ant/dya)



Glitchy Glam



Extra Celestial



Gimme Gummy

Dibongkar! Rp233 T ...dari hal 1

PDI Perjuangan (PDIP) membantah narasi yang menyatakan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bersumber dari anggaran pendidikan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDI-P, My Esti Wijayati, menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang APBN 2026 serta Peraturan Presiden tentang rincian APBN, pendanaan MBG tercatat dalam pos anggaran pendidikan.

"Di dalam lampiran APBN yang berupa Peraturan Presiden, itu juga secara jelas dinyatakan bahwa Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu di antaranya digunakan untuk MBG sebanyak sebesar Rp 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN," ujar Esti dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Esti menjelaskan, klarifikasi tersebut disampaikan menyusul banyaknya kader di daerah yang mempertanyakan informasi yang beredar di media massa maupun media sosial. Karena itu, menurut dia, perlu ada penjelasan terbuka agar masyarakat dan kader partai memperoleh informasi yang sesuai dengan data resmi APBN.

"Nah, karena di bawah sudah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan itu, maka kiranya kami juga perlu menjelaskan secara terbuka supaya kita menyampaikan kebenaran sesuai dengan data-data yang ada di dalam APBN," katanya.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI-P, Adian Napitupulu, menambahkan bahwa pengaturan mengenai MBG termuat dalam Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.

"Pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan," demikian bunyi aturan yang dibacakan Adian.

Ia menjelaskan, jika ketentuan tidak ditemukan secara rinci dalam batang tubuh undang-undang, maka penjelasan pasal dapat menjadi rujukan.

"Ketika kita tidak mendapatkan pemahaman utuh di batang tubuh, kita bisa mencarinya di penjelasan. Penjelasan demikian," ujar Adian.

Menurut dia, penjelasan tersebut semakin diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN 2026, yang mencantumkan alokasi anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar lebih dari Rp 223 triliun.

"Ternyata MBG memang diambil dari anggaran pendidikan. Menurut Undang-Undang demikian, menurut

Peraturan Presiden juga demikian. Ada angkanya," ucapnya.

Adian menegaskan, penyampaian informasi yang sesuai dengan regulasi merupakan bentuk penghormatan terhadap DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang.

"Nah, ini harus kita luruskan agar rakyat semakin memahami, agar publik tahu bahwa kita menghormati Undang-Undang dan Peraturan Presiden," katanya.

Untuk memverifikasi pernyataan PDIP, hasil penusutan dokumen APBN 2026 menyebut rincian anggaran tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, yang dapat diakses publik melalui situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) kementerian dan lembaga.

Dalam Lampiran VI, tercatat total anggaran pendidikan sebesar Rp 769.086.869.324.000 yang dialokasikan ke berbagai kementerian dan lembaga. Salah satu penerima alokasi adalah Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang menangani program MBG.

Alokasi untuk BGN tercantum pada poin 1.1.23 dengan nilai Rp 223.558.960.490.000.

Gugatan ke MK

Perdebatan mengenai penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG mencuat setelah seorang guru honorer, Reza Sudrajat, mengajukan uji materi Undang-Undang APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menilai, dimasukkannya anggaran MBG ke dalam pos pendidikan menyebabkan porsi anggaran pendidikan murni menyusut jauh dari amanat konstitusi sebesar 20 persen.

Reza menggugat Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2025 karena menilai program MBG lebih tepat ditempatkan dalam fungsi perlindungan sosial.

Menurut perhitungannya, apabila anggaran MBG dikeluarkan dari komponen pendidikan, maka anggaran pendidikan murni hanya berkisar 11,9 persen. Ia juga menilai dampak kebijakan tersebut telah terasa di lapangan, terutama terkait pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan serta kesejahteraan guru.

Sebelumnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengatakan hasl senada.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai pencantuman anggaran MBG sebesar Rp 223 triliun ke dalam komponen 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN 2026 justru mempersempit ruang

fiskal pendidikan.

"Jangan memutarbalikkan fakta. MBG itu jelas mengurangi dana pendidikan di UU APBN 2026. Rakyat jangan dibohongi," ujar Ubaid.

Menurut Ubaid, secara nominal ketentuan alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan memang terpenuhi. Namun, jika ditelusuri lebih rinci, sebagian besar dana dalam pos tersebut terserap untuk membiayai program MBG.

"Secara angka kuota 20 persen memang terpenuhi, tapi secara detail ternyata MBG masuk di dalamnya. Ini pencurian ruang fiskal bagi pembiayaan akses anak ke sekolah, peningkatan kualitas guru, dan sarana sekolah," katanya.

Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk "anggaran titipan" yang dipaksakan masuk ke dalam pos pendidikan. Menurutnya, walaupun secara nominal anggaran pendidikan tampak meningkat, kualitas belanja pendidikan justru mengalami penurunan.

"Kalau dibilang anggaran naik, ya naik secara nominal, tapi turun secara kualitas. Sekolah kita masih banyak yang roboh, gaji guru masih seadanya, tapi pemerintah malah sibuk mengurus logistik dapur lewat anggaran sekolah," ujarnya. (wid,ist,kom/dya)

Banyak Mitra SPPG Markup Bahan Baku

WAKIL Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mendapat banyak laporan tentang para mitra yang sering melakukan markup bahan baku pangan untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dia mengingatkan para Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, maupun Pengawas Gizi, agar tidak pernah mau berkompromi dengan Mitra SPPG dalam praktek curang yang mencemari program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini.

"Ingat! Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, Pengawas Gizi, jangan pernah mau mengikuti kemauan, apalagi malah bekerjasama dengan Mitra SPPG yang memarkup harga bahan baku pangan untuk Program MBG ini, apalagi dengan kualitas bahan pangan yang jelek," kata Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi itu.

Nanik juga mengaku menerima banyak dari kepala SPPG soal Mitra yang sering memarkup harga di atas HET, dan memaksa mereka menerima bahan baku berkualitas buruk.

Untuk itu, dia sudah memerintahkan Koordinator Wilayah Surakarta, Boyolali, Sragen, dan

Karanganyar untuk mendata semuanya. "Anda keliling, cek langsung ke SPPG-SPPG, di SPPG mana saja yang terjadi markup ini," ujarnya.

Keteguhan untuk tidak mau berkompromi ini sangat penting. Sebab, jika Badan Pengawas Keuangan (BPK) menemukan mark up bahan pangan dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dalam laporan keuangan SPPG, Kepala SPPG yang harus bertanggung jawab.

"Mitra bisa onggang-onggang, tapi anda yang harus berhadapan dengan hukum," kata mantan Jurnalis Senior itu.

Karena itu, tidak hanya mengingatkan para pengelola dapur MBG saja, Nanik bahkan mengancam para Mitra nakal yang telah memarkup harga bahan pangan di atas HET, dan kemudian memaksa Kepala SPPG untuk menerima bahan baku pangan dari satu dua supplier yang mereka tunjuk, apalagi dengan kualitas buruk.

"Kepala SPPG, silakan anda sampaikan kepada Mitra anda, kalau ada Mitra yang ketahuan memark-up harga pangan, dan hanya menyediakan satu dua supplier saja,

maka akan saya suspend!" ujar Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu, dengan tegas.

Pemasok bahan baku pangan untuk dapur SPPG, tidak boleh didominasi oleh satu dua supplier yang diarahkan Mitra.

SPPG justru harus memberdayakan kelompok tani, kelompok peternak, kelompok nelayan, koperasi, dan UMKM di sekitar dapur MBG untuk menjadi pemasok bahan pangan. Koperasi yang dimaksud juga bukan koperasi buatan Mitra yang hanya sekadar untuk mengakali aturan.

Nanik juga melarang SPPG menolak pasokan bahan pangan dari para petani, peternak, maupun nelayan kecil lokal dengan tidak semena-mena. SPPG bahkan diwajibkan untuk membina dan membantu mereka untuk membuat Usaha Dagang agar menjadi supplier bahan baku pangan.

Dengan banyaknya supplier bahan pangan yang terlibat, diharapkan masyarakat di sekitar dapur juga ikut merasakan manfaat Program MBG, karena roda ekonomi di desa bergerak. (tin,tmpp/dya)

INDONESIA ABSTAIN SAAT PBB VOTING DUKUNG PERDAMAIAN DI UKRAINA

Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengadakan pemungutan suara terkait dukungan terhadap perdamaian di Ukraina. Hal ini bertepatan dengan empat tahun sejak invasi oleh Rusia. Dalam forum tersebut, Indonesia memilih abstain bersama Amerika Serikat (AS), China maupun Arab Saudi.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan resolusi gencatan senjata terkait perang Rusia vs Ukraina melalui sesi khusus pada Selasa (24/2/2026). Resolusi dengan judul "Dukungan untuk Perdamaian Abadi di Ukraina" meraih 107 suara yang menyepakati. Sementara, abstain sebanyak 51 negara dan menolak 12. Amerika Serikat, Arab Saudi, China, hingga Indonesia memilih abstain.

Resolusi yang dibahas dalam rapat Majelis Umum PBB itu juga menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat serta terciptanya perdamaian yang menyeluruh, adil, dan berkelanjutan di Ukraina.

Delegasi Amerika Serikat sebelumnya meminta agar dilakukan pemungutan suara terpisah untuk paragraf-paragraf yang menyinggung keutuhan wilayah Ukraina dan hukum internasional, namun usulan tersebut ditolak.



Sebuah keluarga berjalan melewati kendaraan lapis baja Rusia yang hancur di Kyiv pada 23 Februari 2026. Diketahui, saat ini perang dengan Ukraina sudah empat tahun berlangsung. (afp)

Sikap abstain AS ini mencerminkan perubahan kebijakan sejak pergantian kepemimpinan dari Presiden Joe Biden ke Donald Trump.

Di bawah Trump, dukungan penuh dan tanpa syarat kepada Ukraina disebut mulai mereda. Trump bahkan dinilai membuka kembali jalur diplomatik

dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, serta beberapa kali menolak secara langsung mengutuk invasi Rusia.

Wakil duta besar AS untuk PBB, Tammy Bruce, menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik seruan PBB untuk gencatan senjata. Namun, ia menilai ada sejumlah bahasa dalam

FAKTA-FAKTA PERANG RUSIA-UKRAINA

Korban Jiwa dan Dampak Kemanusiaan

- **Total Korban:** Estimasi total korban (tewas dan terluka) dari kedua belah pihak diperkirakan telah menembus 1,8 juta hingga 2 juta orang.
- **Korban Sipil:** Pada tahun 2025 saja, tercatat 2.514 warga sipil tewas dan 12.142 terluka, menunjukkan peningkatan fatalitas sipil sebesar 31% dibanding tahun sebelumnya.
- **Pengungsi:** PBB mencatat sekitar 12,8 juta orang telah mengungsi sejak awal invasi.

Korban Jiwa dan Dampak Kemanusiaan

- **Okupasi Wilayah:** Rusia saat ini menduduki sekitar 20% wilayah Ukraina, mencakup wilayah Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson, dan Krimea.
- **Dinamika Pertempuran:** Ukraina sempat melaporkan keberhasilan merebut kembali sekitar 201 km² wilayah di dalam perbatasan Rusia (wilayah Kursk) pada Februari 2026. Namun, Rusia juga mengklaim perebutan 12 desa di Ukraina dalam dua pekan pertama Februari 2026.
- **Kerugian Alutsista:** Dalam empat tahun peperangan, Kyiv dilaporkan telah kehilangan sekitar 670 pesawat tempur.



Rusia Ultimatum Prancis-Inggris

RUSIA mengultimatum pecahnya perang antara negara bersenjata nuklir. Hal ini seiring tuduhan bila Ukraina berupaya memperoleh senjata nuklir dengan bantuan Inggris dan Prancis.

"Kami sekali lagi memperingatkan risiko konfrontasi militer langsung antara kekuatan nuklir dan, dengan demikian, konsekuensi yang berpotensi sangat serius," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia dikutip Rabu (25/2/2026).

Dalam pernyataan yang dirilis bertepatan dengan peringatan empat tahun invasinya ke Ukraina, badan intelijen luar negeri Rusia, SVR, menyatakan Inggris dan Prancis meyakini Ukraina akan mendapatkan posisi tawar yang lebih menguntungkan dalam mengakhiri perang jika memiliki "bom nuklir, atau setidaknya apa yang disebut 'bom kotor'".

Klaim SVR itu tidak disertai bukti dokumenter untuk mendukung klaim tersebut. "Bom kotor" adalah

perangkat peledak yang dipadukan dengan material radioaktif yang dapat mencemari area luas. Namun, perangkat ini sepenuhnya berbeda dari senjata atom yang dirancang untuk memicu ledakan nuklir besar.

SVR menuduh London dan Paris "secara aktif bekerja" untuk menyediakan senjata nuklir dan sistem peluncurnya kepada Ukraina, sambil membuatnya seolah-olah Kyiv memperolehnya secara mandiri.

Kantor berita Rusia mengutip ajudan Kremlin Yuri Ushakov yang mengatakan Moskow akan memberi pengarahannya kepada Amerika Serikat mengenai isu tersebut. Rusia menilai hal ini akan berdampak pada pembicaraan yang dimediasi AS untuk mengakhiri perang di Ukraina.

Sementara itu, dikutip Reuters, juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Heorhii Tykhyi, membantah klaim Rusia tersebut.

"Sebagai catatan: Ukraina sudah berkali-kali membantah klaim Rusia yang absurd seperti ini, dan kami

kembali secara resmi menolaknya sekarang," ucap Tykhyi.

Selama ini, Moskow berulang kali melontarkan ancaman nuklir terselubung yang diduga demi mencegah AS Cs memberikan dukungan keamanan yang terlalu besar kepada Ukraina.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis menyebut tuduhan Rusia itu juga sebagai "disinformasi terang-terangan". Sementara juru bicara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan "tidak ada kebenaran dalam tuduhan ini."

Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pernah mengkritik keputusan Kyiv pada 1990-an yang melucuti persenjataan nuklir mereka warisan dari Uni Soviet tanpa memperoleh jaminan keamanan yang kuat dan mengikat.

Namun, Ukraina telah menyatakan tidak berupaya untuk memiliki kembali senjata nuklir dan tetap menghormati seluruh perjanjian internasional. (wid,ana,ist/dya)

resolusi tersebut yang justru dapat mengganggu upaya diplomasi untuk mengakhiri perang, meskipun ia tidak menjelaskan bagian mana yang dimaksud.

Dari pihak Ukraina, Wakil Menteri Luar Negeri Mariana Betsa menyatakan bahwa meskipun ada upaya perdamaian yang dipimpin AS dan didukung Eropa, Rusia belum menunjukkan niat sungguh-sungguh untuk menghentikan agresi.

"Meskipun ada upaya perdamaian yang dipimpin oleh AS dan didukung oleh Eropa, Rusia terus menunjukkan tidak adanya kemauan tulus untuk menghentikan agresi ini," katanya dikutip CNA, Rabu (25/2/2026).

Wakil duta besar Rusia, Anna Evstigneeva, membalas dengan menyarankan agar Ukraina lebih fokus pada diplomasi ketimbang menginisiasi pemungutan suara yang dinilai politis.

Duta Besar Ukraina untuk AS, Olga Stefanishyna, mendesak pemerintahan Trump untuk meningkatkan tekanan terhadap Rusia. Ia berharap Kongres AS dapat segera mengesahkan Undang-Undang yang memberlakukan tarif dan sanksi sekunder terhadap negara-negara yang masih berbisnis dengan Rusia, guna melemahkan ekonomi Moskow dan membatasi pendanaan perang. (gus,cna,ist/dya)